



2


PEMAHAMAN TENTANG *REINVENTING GOVERNMENT*




Pemahaman Re Inventing Government



Konsep Dasar Penentuan Prioritas (Priority Setting)


 ***re inventing*** diartikan sebagai penemuan kembali, atau dapat diinterpretasikan sebagai ***interpreneur***. Sedangkan pengertian ***government*** diartikan sebagai pemerintahan, yaitu suatu kewenangan kekuasaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu pula suatu pemerintah mengemban tugas untuk membangun suatu negeri **meliputi infrastruktur, pelayanan umum, pelayanan social, pengaturan pembangunan fisik, social dan ekonomi, sampai dengan menentukan kebijakan politik.**

 ***government*** diartikan sebagai pemerintahan, yaitu suatu **kewenangan kekuasaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan untuk kesejahteraan rakyat.** Untuk itu pula suatu pemerintah mengemban tugas untuk membangun suatu negeri meliputi infrastruktur, pelayanan umum, pelayanan social, pengaturan pembangunan fisik, social dan ekonomi, sampai dengan menentukan kebijakan politik.

Pemahaman Re Inventing Government



Konsep Dasar Penentuan Prioritas (Priority Setting)

 Pengertian *re inventing government*, dapat ditafsirkan sebagai **pengaturan kembali system pemerintahan dengan cara baru yang inovatif/Kewirausahaan**. Pola pemerintahan lama yang birokratis, dinilai tidak efisien dalam perkembangan zaman, sehingga perlu disusun kembali dengan melakukan pemangkasan birokrasi.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



Menurut Osborne dan Gaebler dalam bukunya yang berjudul *Reinventing Government*, sepuluh prinsip mewirausahakan birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. **Pemerintahan katalis (*Catalytic Government : Steering Rather Than Rowing*)**. Pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan .
- b. **Pemerintah milik masyarakat (*Community-Owned Government : (Empowering Rather Than Serving)*)**. Pemerintah hendaknya lebih berorientasi untuk memberdayakan masyarakat tidak sekedar melayani.
- c. **Pemerintah yang kompetitif (*Competitive Government : Injecting Competition into Service Delivery*)**. Pemerintah perlu memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



- d. **Pemerintah yang digerakkan oleh misi (*Mission-Driven Government : Transforming Rule-Driven Organizations*).** Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

- e **Pemerintahan yang berorientasi hasil (*Results-oriented government : Funding Outcomes, Not Inputs*).** Pemerintah berorientasi hasil mampu membiayai hasil bukan masukan.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



- f. Pemerintahan berorientasi pada pelanggan (***Customer-Driven : Meeting the Needs of the Customer, Not the bureaucracy***)
 - . Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
- g. Pemerintahan wira usaha (***Enterprising Government : Earning Rather than Spending***). Menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
- h. Pemerintah antisipatif (***Anticipatory Government : Prevention Rather than Cure***). Berupaya mencegah daripada mengobati.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



-
- i. Pemerintah desentralisasi (***Decentralized Government : From Hierarchy to Participation and Team Work***). Dari hierarki menuju partisipatif dan kerja tim.
- j. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar (***market-Oriented Government : Laveraging Change Through the Market***).
Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (**sistem prosedur pemaksaan**)

Prinsip-prinsip *reinventing government*



Dari **prinsip reinventing government yang disampaikan David Osborne**, maka terkandung 5 prinsip yang merupakan intinya, yaitu:

- 1. *Steering***, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi dan mengarahkan tuntutan dan keinginan masyarakat dan memformulasikannya dalam bentuk peraturan. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatannya secara fisik, diserahkan pada masyarakat atau kepada swasta.
- 2. *Empowering***, pemerintah menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat agar kapasitas masyarakat dapat meningkat, sehingga dapat berkiprah dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat yang membangun untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, akan lebih berdedikasi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan.
- 3. *Meeting the need of the consumer, not the beureaucracy***, pemerintah harus dapat memahami kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan karena tugas pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Dengan demikian, tuntutan kualitas produk juga ditentukan masyarakat.

Prinsip-prinsip *reinventing government*



4. **Earning**, ini bentuk penghematan anggaran belanja pemerintah, yaitu lebih mengutamakan penghasilan dari pada pembelanjaan. Oleh karena itu, sebagian tugas pemerintah dilimpahkan kepada lembaga non pemerintah, sehingga struktur organisasi pemerintah menjadi ramping.
5. **Prevention**, pemerintah antisipatif, yaitu melakukan kebijakan dan tindakan yang sifatnya antisipatif karena pencegahan adalah lebih baik dari pada perbaikan.



**WASSALUMUALAIKUM WAROHMATULLAHI
WABAROKATUH DAN TERIMA KASIH**